



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA SATPOL PP DALAM PENERTIBAN MINUMAM BERALKOHOL  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG PELARANGAN DAN PENINDAKAN  
PENYAKIT MASYARAKAT**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH**

**RIKY DWI JUANDA**  
**NIM. 11527103243**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**RIAU**

**2021**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Penertiban dan penyebaran minuman beralkohol yang di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan Rengat Barat kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2014 tentang pelarangan dan penindakan penyakit masyarakat yang ditulis oleh :**

Nama : Riky Dwi Juanda


NIM : 11527103243

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

  
**Basir, SH, MH**  
**NIK. 130217026**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“UPAYA SATPOL PP DALAM PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PELARANGAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT”** yang ditulis oleh:

Nama : **RIKY DWI JUANDA**  
 NIM : **11527103243**  
 Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Selasa, 27 Juli 2021**  
 Waktu : **13.00 WIB**  
 Tempat : **Daring / online**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juli 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Erman, M.Ag**

Sekretaris  
**Joni Alizon, SH., MH**

Penguji I  
**Dr. Aslati, M.Ag**

Penguji II  
**Asril, SH., MH**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005



## ABSTRAK

**Riky Dwi Juanda: (Tahun 2021) Upaya Satpol Pp Dalam Penertiban Minumam Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pelarangan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat.**

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang semakin marak akan menimbulkan angka kriminal yang tinggi di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol akan merasa ketergantungan dan menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengonsumsi minuman beralkohol tersebut. Dengan demikian sudah seharusnya menjadi tugas bagi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan yakni, Bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam meminimalisir penyebaran Minuman Keras yang ada di Kecamatan Rengat barat Kabupaten Indragiri Hulu, Apa saja kendala yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan oprasi terhadap penyebaran minuman keras.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian lapangan, penelitian dilakukan dengan observasi tempat perdagangan penjualan minuman keras, dan wawancara langsung dengan orang-orang terkait dengan penyebaran minuman keras, seperti, penjual minuman keras, satuan polisi pamong praja, tokoh masyarakat di kecamatan rengat barat, dan juga Bapak camat rengat barat. Wawancara yang dilakukan kepada populasi yang telah sebutkan, populasi dan sampel yang penulis sebutkan menjadikannya sebagai data primer penulisan, sedangkan data sekunder yang penulis dapati diperoleh melalui karya-karya ilmiah serta buku-buku yang telah ada sebelumnya.

Penyebaran minuman keras, maka satuan polisi pamong praja melakukan penanggulangan dengan upaya, satuan polisi pamong Indragiri Hulu memiliki beberapa tahapan dalam menangani pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, seperti memberi peringatan, menaikkan kasus ketingkat selanjutnya hingga para pelanggaran dapat merasa jera dengan pelanggaran yang dilakukannya. Namun di balik upaya tersebut, polisi pamong praja dalam menangani peredaran minuman keras juga mengalami kendala seperti eksternal maupun internal. Seperti, kurangnya personil, serta operasional dan masyarakat yang tidak tahu atau tidak sadar akan hukum, kemudian faktor ekonomi sangat mempengaruhi para pedagang menjual minuman keras untuk mendapatkan penghasilan.

**Kata kunci:** *Penertiban umum, Minuman Berakohol, Satuan Polisi Pamong Praja*



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penertiban dan penyebaran minuman beralkohol yang dilakukan satuan polisi pamong praja di kecamatan rentat barat kabupaten indragiri hulu berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2014 tentang pelarangan dan penindakan penyakit masyarakat”**

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan kali ini ucapan Terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda Juraidi, dan ibunda Mainarti yang telah berperan penting dalam upaya membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai sekarang ini serta mendo'akan penulis dalam meraih cita-cita. Ridho dari ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M. Ag ,selaku Rektor UIN Suska Riau. Bapak Dr.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA, selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau.
2. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd, selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau. Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph. D, selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau. Dan beserta stafnya
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Hajar M. Ag, serta Wakil Dekan I Dr. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II Dr. Wahidin, M. Ag dan Wakil Dekan III Dr. H. Maghfirah, MA yang telah memberikan kemudahan selama penFulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.
4. Bapak Firdaus, SH, MH selaku Ketua jurusan Ilmu Hukum serta seluruh karyawan dan dosen yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Basir, SH. MH selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ide, saran, waktu dan perhatian kepada penulis dalam penelitian ini.
6. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku penasehat akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.

9. Terimakasih juga saya ucapkan kepada abang Alamsyah yang telah banyak berjasa dan selalu mensupport dari awal kuliah sampai saat ini dan juga saya ucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebut satu-persatu.

10. Untuk sahabat penulis yang merubah pola pikir penulis, yang berjuaang bersama-sama, dan yang membantu penulis dikala jatuh, saya ucapkan terimakasih kepada, Mhd Risky dua putra, Rinaldo oktaviano, Rendy Meidi seitiawan, M Agum alrifki, Randy oktariansa.

11. Terimakasih kepada keluarga Ilmu Hukum , atas kehangatan dan pertemanan selama di kampus.

12. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin .

Pekanbaru, 5 Juli 2021

Penulis

**Riky Dwi Juanda**  
**NIM. 11527103243**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	.....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang .....		1
B. Batasan Masalah .....		10
C. Rumusan Masalah.....		10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....		11
E. Metode Penelitian .....		12
F. Sistematika Penulisan .....		16
<b>BAB II LOKASI PENELITIAN</b>		
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu .....		18
B. Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ) .....		25
C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja .....		26
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>		
A. Good Governance .....		36
B. Ketertiban Umum .....		41
C. Minuman Keras .....		45
D. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah .....		47
E. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja .....		49
F. Pengertian Ketertiban dan Ketentraman Umum .....		51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A. Upaya Satpol PP Dalam Penertiban Minumam Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pelarangan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat .....		53
B. Kendala yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja INDRAGIRI HULU terhadap Penyebaran Penjualan Minuman Keras .....		57





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi Dan Sample .....	14
Tabel II.1	Luas Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Perkecamatan tahun 2017.....	22
Tabel IV.1	Daftar Pelanggaran Yustisi tahun 2019 – 2020 .....	55

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pancasila adalah dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara republic indonesia , adapun pancasila berasal dari bahasa sangsekerta yang berarti lima dasar ataupun lima prinsip dasar. Di dalam sila ke-5 berbicara tentang keadilan sosial, adapun sila ke-5 adalah keadilan social bagi seluruh rakyat indonesia, maksud dari sila ke-5 ini sendiri setiap warga Negara indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hkum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan<sup>1</sup>. Sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945, maka keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur. Adapun cakupan mengenai keadilan sosial seperti hokum, kesehatan, pendididkan, ekonomi, dan bidang sosial.

Minuman mengandung etinol alkohol atau yang sering disebut sebagai minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung bahan psikoaktif yang memiliki efek-efek tertentu apabila diminum atau masuk ke dalam tubuh. Minuman beralkohol telah populer di berbagai belahan dunia sejak jaman para nabi. Disebutkan bahwa minuman beralkohol (Khamr) adalah minuman yang memabukkan yang banyak diminum oleh orang – orang pada jaman jahiliyah (jaman kebodohan). Tidak kalah dengan hal tersebut minuman beralkohol berkembang pesat di zaman modern. Dunia modern mengenal berbagai

---

<sup>1</sup> Al hakim, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Malang: Impres Media, 2002), h. 21

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

macam minuman beralkohol baik yang berasal dari olahan tradisional maupun yang berasal dari olahan pabrik modern<sup>2</sup>. Namun terlepas dari berbagai aspek mengenai minuman beralkohol, masyarakat dunia mulai menyadari akan efek negatif yang dapat ditimbulkan akibat meminum minuman yang mengandung etanol ini

Minuman beralkohol adalah satu dari sekian banyak faktor yang dapat memicu terjadinya perilaku negatif. Perilaku negatif muncul akibat konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sehingga menyebabkan hilangnya kontrol diri atau disebut mabuk dan pada akhirnya dapat meimbulkan tindakan-tindakan pelanggaran yang dapat meresahkan masyarakat. Di Indonesia minuman beralkohol diawasi peredarannya oleh negara, terutama minuman impor, yaitu jenis minuman beralkohol seperti, anggur, bir brendi, tuak, vodka, wiski dan lainlain. Sering dijumpai pemberitaan, baik di media cetak maupun media elektronik mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi minuman keras ditambah lagi dengan munculnya minuman keras oplosan yang banyak dijumpai di kios-kios pinggir jalan<sup>3</sup>.

Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Sebagai contohnya adalah berjualan minuman beralkohol atau sering disebut dengan minuman keras. Dalam pasal 22 ayat (7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang

<sup>2</sup> <https://halosehat.com/farmasi/aditif/25-efek-bahaya-alkohol-bagi-kesehatan-dan-kehidupan-sosial>, diakses pada Selasa, 17 Oktober 2017 pada pukul 20.05 WIB.

<sup>3</sup> <https://riaupos.jawapos.com/kriminal/25/04/2018/181166/58-kategoriberita-indragiri-hulu.html> di akses pada senin, 15 juni 2020 pada pukul 20.20 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Kasim Riau

Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol) terlebih dahulu.<sup>4</sup>

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang semakin marak akan menimbulkan angka kriminal yang tinggi di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol akan merasa ketergantungan dan menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengonsumsi minuman beralkohol tersebut. Sehingga orang yang mengonsumsi minuman tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain seperti perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pembodohan, pengeroyokan, pengerusakan. Minuman keras atau minuman beralkohol menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor.74 Tahun 2013 tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang pelanggaran dan penindakan penyakit masyarakat. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur mengenai penggolongan dan jenis minuman beralkohol, peredaran dan produksi minuman beralkohol, penjualan, perizinan usaha perdagangan, retribusi daerah, pengendalian pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol, pelaporan, pelarangan, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang baik atau good governance, semua lini pemerintahan haruslah bergerak selaras termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah beserta seluruh aspek yang ada didalamnya. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip 4 pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik<sup>6</sup>.

Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum dalam konteks

---

<sup>6</sup> Dekker nyoman, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*,( Malang: IKIP Malang, 1993), h. 43

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

daerah. Melihat pentingnya peran satuan polisi pamong praja sebagai perangkat pemerintah daerah, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai peran satuan polisi pamong praja di Kecamatan Rengat barat Kabupaten Indragiri hulu dalam pelaksanaan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelarangan dan penindakan penyakit masyarakat

Upaya mewujudkan lingkungan yang tertib dan nyaman, sehubungan dengan kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja ) yang bertanggungjawab mewujudkan kondisi tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut dengan singkatan Satuan Polisi Pamong Praja . Menurut Pasal 256 ayat (7) Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 21, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satuan Polisi Pamong Praja menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

“Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah terutama dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”

Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Satuan Polisi Pamong Praja juga kurang diberikan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat bahwa pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah selama ini jarang terjadi yang bersifat serius, kalau pun ada maka efektifnya ditangani oleh pihak kejaksaan dan pihak kepolisian yang selama ini dianggap sebagai pihak yang berhak menangani pelanggaran hukum yang ada.

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satuan Polisi Pamong Praja adalah “Perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang dikepalai oleh kepala daerah” (pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) kepala daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Indragiri Hulu.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Indragiri Hulu dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Sehingga peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan dua metode yakni metode



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), pada metode preventif, Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung ke arah penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan daerah<sup>7</sup>. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah yaitu untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

Upaya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya di Kabupaten Indragiri hulu dalam hal ini sudah diterapkan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018. Namun kenyataannya pelaksanaan ketertiban dan ketentramannya belum bisa dikatakan maksimal, karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Perda serta laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan kata lain, banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Hal itu dapat dilihat pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, tidak

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Bobby Rachman selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu pada 17 juni 2020.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu.

Salah satu kasus yang menjadi pelanggaran peraturan daerah yaitu maraknya peredaran penjualan minuman keras atau miras di warung, pasar, cafe, dan di rumah penduduk. Sesuai Pasal 2 Huruf G Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pelarangan dan Penindakan Penyakit Masyarakat .

Kasus yang ada di terminal gerbang sari, bahwa banyak warga yang mengeluh perihal maraknya praktik penjualan dan peredaran miras. Meski sudah ada larangan penjualan miras di toko-toko, warung, kafe, di taman kota, dan di sekitar rumah penduduk. Dalam praktiknya biasanya penjualan miras dilakukan pada malam hari. Kasus lain, maraknya jumlah kafe karaoke liar yang ada di Kabupaten Indragiri hulu akhir-akhir ini membuat petugas Satuan Polisi Pamong Praja kebingungan. Pasalnya dalam melakukan penertiban selalu terkendala terbatasnya personil dan belum adanya dasar hukum yang kuat untuk memberikan sanksi tegas terhadap pemilik kafe dan karaoke. Hal ini bisa dikatakan Satuan Polisi Pamong Praja “kucing-kucingan” dengan pemilik kafe dalam hal penertiban. Hal itu terjadi manakala salah satu kafe ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan beralih ke lokasi lain, seketika itu juga kafe yang telah ditertibkan akan buka kembali. Pemilik kafe hanya menutup saat ada operasi penertiban saja. Sedangkan ketika tidak ada operasi, mereka tetap buka. Seperti yang terjadi di salah satu kafe karaoke kawasan lapangan RTH Rengat Kecamatan Rengat, milik edo. Beberapa waktu

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lalu setelah ditertibkan pada siang hari, malam harinya kembali beroperasi dimana papan peringatan dari Satuan Polisi Pamong Praja ditutup dengan kain.

Fenomena di atas, pada penelitian ini peneliti akan melakukan investigasi lapangan terhadap peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam kewenangan pelaksanaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban tersebut yang melanggar Peraturan daerah Pasal 2 Huruf G Nomor 11 Tahun 2014 Kabupaten Indragiri Hulu merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan seluruh masyarakat di Kabupaten Indragiri hulu.

Dalam hal ini peran Satuan Polisi Pamong Praja yang juga sebagai penegak Peraturan Daerah sangat dibutuhkan demi tercapainya ketertiban dan ketentraman khususnya di Kabupaten

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk bekerja secara profesional. Menurut Kusnandar, profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalisme sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan professional apabila dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan, sedangkan dinyatakan tidak profesional apabila melanggar atau tidak sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan permasalahan yang penulis jumpai, maka penting kiranya penelitian ini dilaksanakan, baik secara teoritis dan praktisnya, oleh karena itu penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengambil permasalahan ini dengan judul **“Upaya Satpol Pp Dalam Penertiban Minumam Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pelarangan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat”**.

### **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu dalam menertibkan minuman keras yang ada di kecamatan rengat barat.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang sebagaimana telah di uraikan maka permasalahan yang di kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam meminimalisir penyebaran Minuman Keras yang ada di Kecamatan Rengat barat Kabupaten Indragiri Hulu ?
2. Apa saja kendala yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan oprasi terhadap penyebaran minuman keras ?



## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam permasalahan ini penulis juga ingin mencapai manfaat baik bagi penulis maupun bagi orang lain yaitu :

- a. Untuk mengetahui upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam meminimalisir penyebaran minuman keras di Kecamatan Rengat barat Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui kendala saat menjalankan operasi minuman keras sehingga penulis dapat memberikan saran dan masukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Indragiri hulu dalam menjalankan operasi minuman keras.

### **2. Manfaat penelitian**

- a. Sebagai penambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi ilmu pengetahuan bagi pihak lain serta sebagai bahan perbandingan bagi penulis atau peneliti lain dalam melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini
- c. Sebagai sumbangsi pemikiran penulis dalam bentuk karya ilmiah dalam lingkup Hukum Tata Negara kepada fakultas syariah dan Ilmu Hukum terkhusus jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## E. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>8</sup> Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dan jalan mempelajari, menganalisa, dan memenuhi keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosilogis, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta dikaitkan dengan studi kepustakaan. Pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepskan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.<sup>9</sup> Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.<sup>10</sup> Pada umumnya pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan, observasi (pengamatan) dan wawancara (*interview*).

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 2

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 133

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UII Press, 1982), h. 51

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>11</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini termasuk dalam objek penelitian, karena objek termasuk pada sifat, keadaan dari suatu benda. Maka dari itu objek dari penelitian ini berlokasi di Kecamatan Rengat barat Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan penulis memilih lokasi ini karena dapat dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara.

## 3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>12</sup> Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>13</sup>

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>14</sup>

Jumlah populasi dan sampel yang akan penulis teliti dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, h. 25

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 118

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 119

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.1**  
**Populasi Dan Sample**

NO	POPULASI	JUMLAH	SAMPEL	PERSENTASE
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	100%
2.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	6	3	50%
3.	Camat Rengat Barat	1	1	100%
4.	Tokoh Masyarakat	3	3	100%
5	Pedagang	10	5	50%
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>56%</b>

Sumber : Data Penelitian 2021

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber data dibagi 2 yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>15</sup>  
Dalam penelitian ini sumber datanya adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu .
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>16</sup>

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan maka penulis menggunakan beberapa metode. Diantaranya adalah :

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 106

<sup>16</sup> *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengamatan (*observation*) yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu. Dari hasil observasi penulis maka penulis mendapatkan sedikit kejanggalan terhadap Peraturan Daerah Indragiri Hulu No 11 tahun 2014 tentang kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menindak lanjuti peredaran minuman keras. Dari observasi penulis peraturan daerah tersebut kurang efektif untuk di jalankan.
- b. Wawancara  
Yaitu situasi perasn antara pribadi bertatap muka (*face to face*) dengan mengajukan pertanyaan yang telah di susun untuk memperoleh jawaban jawaban yang relefan kepada seorang responden<sup>17</sup>. Dalam penulisan ini pihak pihak yang terlibat dalam pewawancaraan iyalah : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Seksi Oprasional Satuan polisi Pamong Praja, Kepala seksi Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, dan beberapa tokoh masyarakat.
- c. Studi Pustaka  
Adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan mengkaji berbagai

---

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, h. 82

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan dan berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>18</sup>

#### d. Dokumentasi

Usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen dilapangan yang terkait dengan penjualan minuman keras, dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja menindaklanjuti penjualan minuman keras di Kabupaten Indragiri Hulu

### 6. Analisis Data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistic yang relefan untuk di gunakan dalam penelitian dalam hal analisis data kualitatif analisis merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan bahan bahan lainnya. Analisis data dilakukan dengan sintesis menyusun kedalam pola memilih nama yang penting dan membuat kesimpulan sehingga dapat di ceritakan kepada orang lain.

### F. Sistematika Penulisan

Adalah kerangka atau garis besar dari suatu masalah sehingga dapat di simpulkan bahwa outline merupakan rencana penulisan yang memuat garis besar, rangkaian ide-ide yang akan disusun secara sistematis. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang dibagi dalam sub-sub bagian sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Syamsudin, *Op.Cit*, h. 101

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KAB. INDRAGIRI HULU**

Menguraikan tentang lokasi penelitian dan kestrukturannya Satuan Polisi Pamong Praja Indragiri Hulu

## **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian tentang efektifitas satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2014 tentang tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja dalam meminimalisir peredaran minuman keras. dan Pembahasan bagaimana kesulitan apa yang di hadapi oleh polisi pamong praja dalam meminimalisir peredaran minuman keras di kabupaten Indragiri hulu

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Menjelaskan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

##### 1. Sejarah Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1948 dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatra Tengah dan Diralisi denan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah pada tanggal 9 November 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonom dalam Provinsi Sumatra Tengah termasuk Kabupaten Indragiri. Kabupaten Indragiri Hulu pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanaan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan, Indragiri Hulu Utara, Indragiri Hulu dan Kewedanaan Kuantan Singingi.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1963 status kewedanaan dihapus bersama dengan penghapusan empat kewedanaan dalam Kabupaten Indragiri. Dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 Dibentuk Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru yang terdiri dari lima daerah tingkat II masing- masing Kabupaten Kampar, Indragiri, Benkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kotamadya Pekanbaru. Dengan dibentuknya Provinsi Riau denan undang-undang nomor 61 tahun 1958 maka timbullah didua kewedanaan tersebut yaitu kewedanaan Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Indragiri Hulu (INHU) dalam Angka BPS INHU tahun 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan kabupaten Indragiri Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royon Kabupaten Indragiri ternyata hasrat tersebut mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPR pusat.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua kabupaten yaitu :

- a. Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan, terdiri dari delapan kecamatan , sekarang 11 kecamatan.
- b. Kabupaten Indragiri hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan yaitu :
  - 1) Kec. Rengat Ibukota Rengat
  - 2) Kec Pasir Penyu ibukota Air Molek
  - 3) Kec Seberida ibukota Pangkalan Kasai
  - 4) Kec. Peranap ibukota Peranap
  - 5) Kec. Kuantan Hilir ibukora Baserah
  - 6) Kec. kuantan tenah ibukota Taluk Kuantan.
  - 7) Kec. Kuantan Mudik ibukota Lubuk Jambi
  - 8) Kec. Singingi ibukota Muara Lembu.<sup>20</sup>

Pada tahun 1996 terjadi penambahan kecamatan dengan adanya pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Penyu, dan Rengat, Kecamatan Yang baru adalah :

- 1) Kec. Benai ibukota Benai

<sup>20</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kec. Kelayang ibukota Simpang Kelayang
- 3) Kec. Rengat Barat ibukota Pematang Reba.

Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Pada tahun 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah Kecamatan sehingga menjadi 14 kecamatan<sup>21</sup> :

- 1) Kec. Rengat ibukota Rengat
- 2) Kec. Rengat Barat, ibukota Pematang Reba
- 3) Kec. Seberida, ibukota Pangkalan Kasai
- 4) Kec. Batang Gangsal, ibukota Seberida
- 5) Kec. Batang Cenaku, ibukota Aur Cina
- 6) Kec. Pasir Penyu, ibukota Air Molek
- 7) Kec. Lirik, ibukota Lirik
- 8) Kec. Kelayang, ibukota Simpang Kelayang
- 9) Kecamatan Peranap ibukota Peranap
- 10) Kec. Batang Peranap, ibukota Pematang
- 11) Kec. Rakit Kulim, ibukota Petonggan
- 12) Kec. Sungai Lala, ibukota Kelawat
- 13) Kec. Lubuk Batu Jays, ibukota Lubuk Batu Tinggal
- 14) Kec. Kuala Cenaku, ibukota Kuala Cenaku

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Indragiri Hulu berada pada posisi 0° LU- 1- 20' LS dan 102-10' BT - 102-48" BB meliputi wilayah seluas 7.676,26 km<sup>2</sup> (767.626,66 Ha). Kabupaten ini ditandai dengan iklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 23.20 C - 31.70 C. Rata-rata curah hujan pada tahun 2008 adalah 2.520,8 mm/tahun. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga Agustus. Berikut ini adalah batasan-batasan Kabupaten Indragiri Hulu:

Barat : Kabupaten Kuantan Singingi

Timur : Kabupaten Indragiri Hilir

Utara : Kabupaten Pelalawan

Selatan : Kabupaten Muara Tebo, Provinsi Jambi

Ibu Kota Kabupaten ini adalah Kota Rengat tetapi aktivitas administrasi berlangsung di Pematang Reba dengan jarak 18 km dari Kota Rengat. Kabupaten ini dibagi ke dalam 14 daerah kecamatan, 154 desa dan 11 kelurahan. Hingga tahun 2008 populasi penduduk tercatat sebanyak 295.291 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 38.47 jiwa/km. Penduduknya terdiri atas suku Melayu sebagai kelompok mayoritas, Jawa, Minang, Batak dan keturunan Cina. Sebagian besar penduduk beragama Islam dan sebagian kecil Protestan, Katolik, Budha dan penganut Animisme.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Perkecamatan tahun 2017**

No	Kecamatan	Luas wilayah (Ha)
1.	Rengat	29.169.80
2.	Rengat Barat	44.138.50
3.	Seberida	78.451.40
4.	Batang Gansal	31.933.30
5.	Batang Cenaku	40.300.35
6.	Pasir Peny	67.013.80
7.	Lirik	25.561.90
8.	Kelayang	68.318.71
9.	Peranap	65.632.00
10.	Batang Peranap	49.742.20
11.	Lubuk Batu Jaya	56.420.80
12.	Kuala Cenaku	101.019.70
13.	Sungai Lala	65.939.20
14.	Rakit Kulim	43.985.00
	Jumlah	767.626.66

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hulu

### 3. Kependudukan dan ketenagakerjaan masyarakat Indragiri Hulu

Penduduk Indragiri Hulu pada tahun 2020 sebesar 444.548 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 228.502 jiwa (51,40%) dan penduduk perempuan 216.046 jiwa (48,60%). Penduduk laki-laki di kabupaten Indragiri Hulu lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dengan *seks ratio* di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 105,76 artinya terdapat 106 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

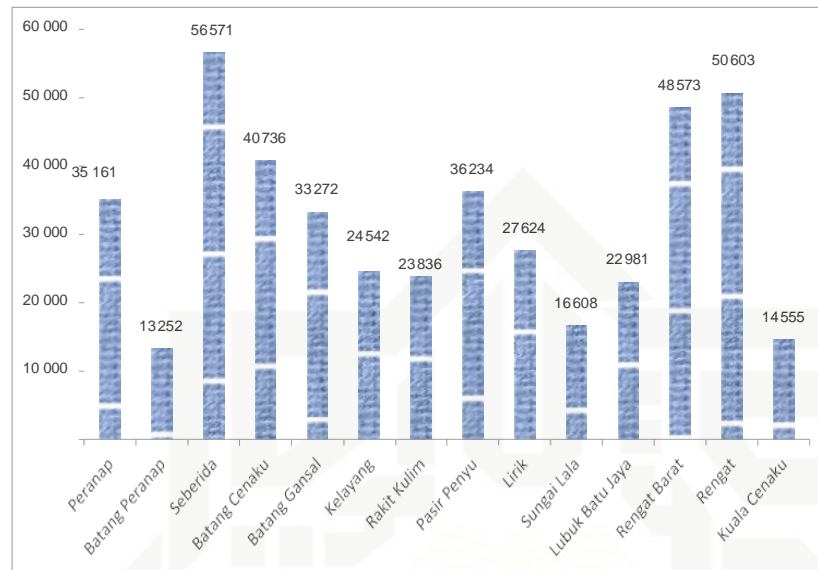
Kepadatan penduduk tertinggi masih terdapat di kecamatan lirik dengan 204 jiwa per kilometer. Kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Peranap yaitu 28 jiwa per kilometer persegi, dengan kondisi luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Peranap masih tergabung dengan kecamatan Batang Peranap.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan di kabupaten indragiri hulu pada tahun 2020



Sumber/Source: Hasil SP2020 (September)/The result of the 2020 Population Census (September)

Jumlah angkatan kerja di kabupaten indragiri hulu adalah sebanyak 215.215 dengan laki-laki 138.672 jiwa dan perempuan 76.543. dari jumlah total tersebut ada sebanyak 204.644 jiwa yang berkerja dan 10.571 jiwa yang masih belum memiliki perkerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja kabupaten indragiri hulu tahun 2020 mencapai 65,94 % jiwa dan pengangguran sebesar 4,70 % jiwa.<sup>24</sup>

#### 4. Kesejahteraan Rakyat

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik. Penduduk di

<sup>24</sup> <https://inhukab.bps.go.id/publication/download.html> (diakses pada 11 februari 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Indragiri Hulu sudah memiliki pola pikir yang maju dan modern. Hal ini terlihat dari persentase penduduk yang berobat jalan cenderung memilih fasilitas kesehatan dibandingkan dengan fasilitas non kesehatan, terutama praktek dokter/bidan yang mencapai 43,92 persen (tahun 2018). Sementara penduduk yang memanfaatkan fasilitas non kesehatan hanya sebesar 1,40 persen.

Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu masih rendah. Sebab, sebanyak 44,47 persen didominasi oleh tamatan SD ke bawah. Artinya, dari 100 penduduk, sebanyak 44 penduduk diantaranya adalah tamatan SD ke bawah termasuk mereka yang tidak memiliki ijazah. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk harus menjadi perhatian serius pemerintah. . Pendidikan yang rendah akan berdampak pada rendahnya produktivitas dan sejalan dengan upah kerja yang diterima. Pada akhirnya, dengan upah yang rendah akan semakin sulit untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.<sup>25</sup>

(TPAK) tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 terlihat sebesar 68,17 persen yang berarti sebanyak 68,17 persen dari jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) aktif secara ekonomi atau tersedia untuk kegiatan produksi sedangkan sisanya (31,83 persen) bukan merupakan angkatan kerja, dalam hal ini bisa jadi masih bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan kegiatan lainnya.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu yang bekerja tahun 2018, didominasi oleh Buruh/

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karyawan/ Pegawai sebesar 39,46 persen. Sedangkan pekerja yang berusaha/wiraswasta sebesar 45,87 persen. Persentase pekerja dengan status pekerja bebas rendah, sekitar 4,43 persen. Umumnya pekerja bebas bekerja sebagai buruh panen, buruh bongkar muat maupun pekerjaan serabutan pada sektor pertanian.<sup>26</sup>

## B. Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad. Tetapi keberadaan dari pada Satuan Polisi Pamong Praja semakin di butuhkan dan di perlukan di era yang telah berkembang seperti saat ini hal tersebut semakin di perlukan semenjak di terapkan Undang-undang mengenai Otonomi daerah. Setelah otonomi daerah berjalan, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi lembaga yang independen yang dimana dalam melaporkan tugas dan kewajibanya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor yang berdiri sendiri. sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, sebagai aparat satuan di perlukan adanya kemampuan yang baik, baik secara fisik maupun non fisik bagi para anggotanya. Peraturan Daerah hanya akan dapat dibentuk apabila terdapatnya keselarasan pendapat antara Bupati sebagai kepala daerah dengan Dewan Perwakilan yang berada di daerah. Termasuk perihal mengenai keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang pada dasarnya mempunyai peranan untuk membantu Kepala daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan di wilayah administratifnya. Namun

<sup>26</sup>.*ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Misdayanti (1993), Peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah di tentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang di wujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan mengenai pengawasan umum. Dasar hukum yang mengatur mengenai Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri adalah bersifat mengikat serta mengatur segala hal mengenai kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja.

### C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja

#### 1. Sejarah Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja di Indonesia

Salah satu perangkat pemerintahan daerah yang bertujuan untuk membantu kepala daerah dalam rangka menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasanya disebut dengan Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>27</sup>

Pada dasarnya pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja ini lahir dari beberapa ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan secara lebih khusus keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja ini diakomodir didalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Beban untuk melaksanakan fungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah sudah menjadi tanggungjawab pemerintah pada jaman kolonial. Dalam kondisi yang tidak stabil dan mengancam Negara Kesatuan

<sup>27</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi\\_Pamong\\_Praja](http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja). (diakses pada (16 februari 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia, maka kemudian dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.<sup>28</sup>

Detasemen Polisi yang telah terbentuk selanjutnya berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja, pada tanggal 10 November 1948 berdasarkan Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No.2/1948. Satuan Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura selanjutnya dibentuk pada tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UR32/2/21/Tahun 1950 Tentang Perubahan Detasemen Pamong Praja menjadi Kesatuan Poliss Pamong Praja. Inilah perkembangan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sejak awal mula terbentuk hingga disahkan menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 3 Maret 1950, maka setiap tanggal 3 Maret diperingati sebagai hari ulangtahun Satuan Polisi Pamong Praja .<sup>29</sup>

Pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura pada tahun 1960 mulai dilakukan dengan berdasar kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 serta dengan dukungan dari para petinggi militer dan angkatan perang. Selanjutnya nama Kesatuan Polisi Pamong Praja berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya, hal ini sesuai dengan

<sup>28</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi\\_Pamong\\_Praja](http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja). (diakses pada (16 februari 2020)

<sup>29</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No.10 tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 hal ini dimaksudkan untuk membedakan Kesatuan Polisi Pamong Praja dengan Korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian pada waktu itu. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963 nama Kesatuan Pagar Baya berubah lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah istilah Satuan Polisi Pamong Praja mulai dikenal.<sup>30</sup>

## **2. Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Perangkat Pemerintah Daerah**

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pemerintahan Daerah Pelaksanaan otonomi daerah memberikan hak dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal sekaligus menyikapi berbagai persoalan yang timbul di daerah serta penyelesaiannya secara mandiri. Untuk melaksanakan setiap urusan pemerintahan daerah harus dibarengi dengan pelaksana pemerintahan daerah yaitu aparatur pemerintahan daerah yang berfungsi untuk melaksanakan roda pemerintahan di daerah. Yang menjadi tolak ukur

---

<sup>30</sup> Sunindhia dan Ninik Widiyanti, 1987, Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h.147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintahannya adalah dengan dimilikinya aparatur pemerintahan daerah tersendiri yang terpisah dengan aparatur pemerintah pusat, hal ini bertujuan untuk memfokuskan daerah dalam mengerjakan urusan pemerintahan daerah sehingga mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara aparatur pemerintahan daerah dan aparatur pemerintahan pusat.<sup>31</sup>

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang baik tidak akan berjalan secara maksimal apabila hanya didukung oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di daerah, tentu hal ini perlu dilengkapi dengan berbagai perangkat pemerintahan daerah. Pada dasarnya perangkat daerah merupakan organisasi/lembaga yang berada dibawah pemerintah daerah yang kemudian bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.<sup>32</sup> Terdapat berbagai organisasi/lembaga yang berada dibawah pemerintah daerah seperti dinas-dinas dan lembaga teknis daerah serta organisasi pemerintahan lainnya.<sup>33</sup>

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Pemerintahan

<sup>31</sup> Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.249

<sup>32</sup> Widjaja HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 28

<sup>33</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, ( Jakarta: PT Kencana, 2009), h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Terdapat dua hal penting dalam rumusan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Pertama, kewenangan pemerintahan daerah menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain. Kedua, peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain tersebut dikeluarkan dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri (otonomi) dan tugas pembantuan. Sehingga sejalan dengan kedua hal tersebut, Hamzah Halim dan Kemal R.S. Putera menyatakan peraturan daerah dibidang otonomi bersumber dari atribusi, sedangkan peraturan daerah dibidang tugas pembantuan bersumber dari kewenangan delegasi.<sup>34</sup>

Sebagai upaya untuk menanggulangi berbagai persoalan yang timbul dimasyarakat, maka stabilitas nasional serta ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu hal yang menjadi focus point pemerintah daerah, sehingga keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja berserta dengan tugas yang melekat padanya untuk membantu kepala daerah dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diharapkan dapat menjadi problem solving dari permasalahan pemerintahan daerah yang tengah berlangsung. Pembentukan Satpol PP secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi

<sup>34</sup> Hamzah Halim & Kemal R.S. Putera, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, (Jakarta: PT Kencana, 2010), h. 34-45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pamong Praja. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 menegaskan bahwa, “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.”

Kemudian didalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Selain itu, disamping menegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah, pada daerah tingkat I Peraturan Gubernur dan pada daerah tingkat II Peraturan Bupati/Walikota.

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat perangkat daerah pada dasarnya ditujukan untuk membantu kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Pembentukan Satuan polisi Pamong Praja di provinsi maupun di kabupaten/kota didasarkan pada peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota. Satuan polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekertaris daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 2.2.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa, “Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.” Maka sebagai perangkat pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi yang terdapat di pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota serta memiliki unsur-unsur penggerak yang bertujuan untuk menjalankan fungsi dan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri.

Dalam pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdapat beberapa perbedaan bentuk struktural organisasinya, yang mana susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala
- b. 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian
- c. Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya apabila dalam struktur organisasi Satpol PP kabupaten/kota terdapat pengklasifikasian yang akan menentukan susunan organisasi tersebut. Klasifikasi tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota terdiri atas Tipe A dan Tipe B.
- b. Besaran organisasi Tipe A dan/atau Tipe B ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah.
- c. Satuan Polisi Pamog Praja Tipe A apabila Variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh).
- d. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B apabila Variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh).

Tipe-tipe susunan organisasi tersebut berdasarkan pada variabel dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka berdasarkan ketentuan tersbut klasifikasi susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja di kabupaten/kota yang termuat dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yakni sebagai berikut:

- a. Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A terdiri atas:
  - 1) Kepala
  - 2) 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian:
  - 3) Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi; dan
  - 4) Kelompok Jabatan Fungsional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B terdiri atas:

- 1) Kepala
- 2) 1 (satu) Subbagian Tata Usaha
- 3) Seksi paling banyak 5 (lima) dan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain ditingkat provinsi atau kabupaten/kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan yang menegaskan bahwa, pada kecamatan dibentuk Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam pemebentukan Satuan Polisi Pamong Praja pada tingkat kecamatan sebagai Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, yang bertujuan agar pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penegakan perda dan peraturan kepala daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.



### Gambaran Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

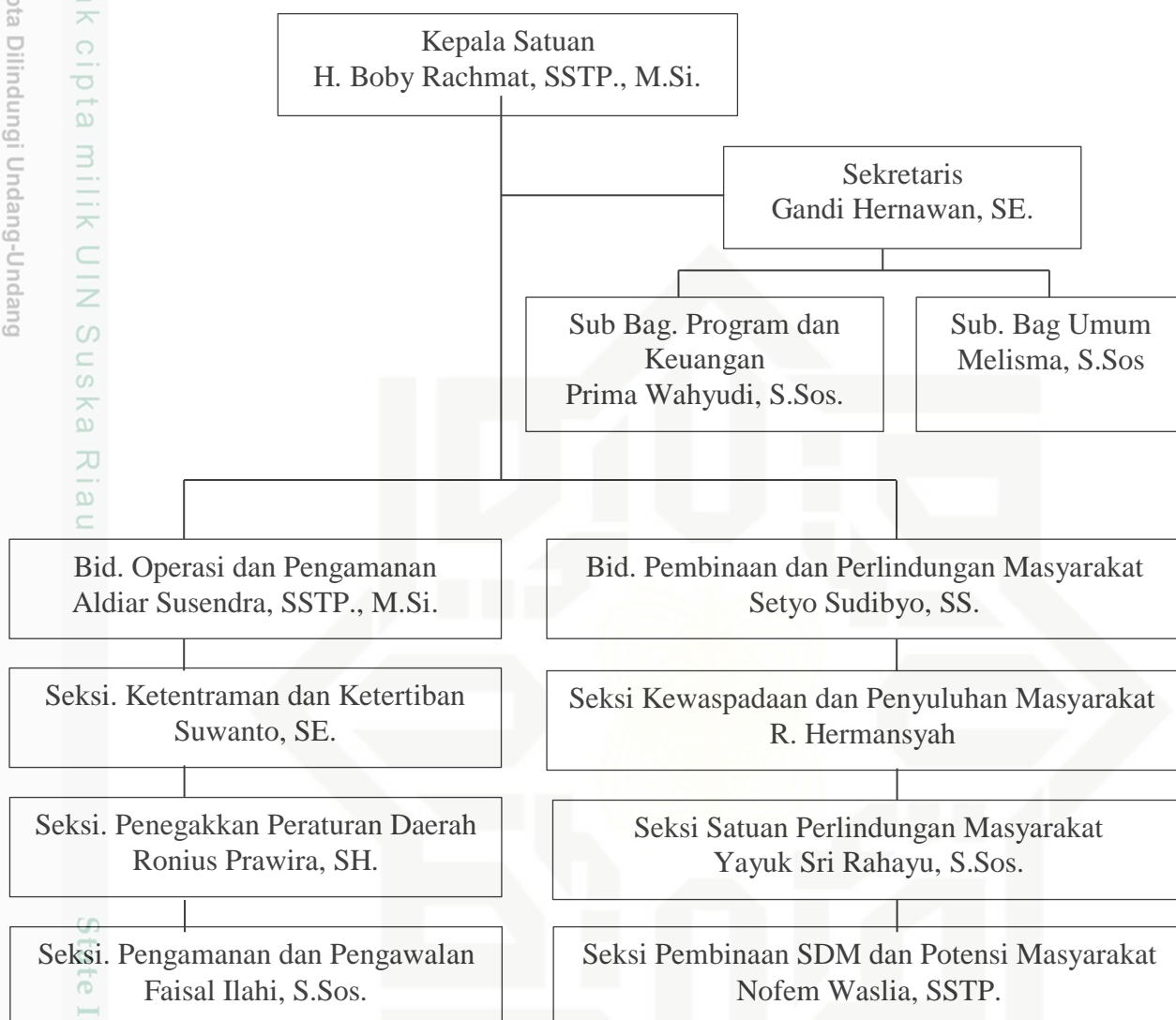
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Good Governance*

##### 1. Pengertian *Good Governance*

*Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.<sup>35</sup>

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

<sup>35</sup> Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 1-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan

## 2. Ciri-Ciri *Good Governance*

Dalam dokumen kebijakan united nation development programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu:

- a. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
- b. Menjamin adanya supremasi hukum.
- c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
- d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.<sup>36</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara. Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan good governance, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Partisipasi (*Participation*) Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.

<sup>37</sup> Dede Rosyada Dkk, Demokrasi, *Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), h. 182



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penegakan hukum (*Rule Of Low*) Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.
- c. Transparansi (*Transparency*) Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekocokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik dibidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.
- d. Responsif (*Responsiveness*) Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhankebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan kepentingan bersama.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Konsensus (*Consensus Orientation*) Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.
- f. Kesetaraan dan keadilan (*Equity*) Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.
- g. Efektifitas dan efisien Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

- h. Akuntabilitas Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.
- i. Visi Strategi (Strategic Vision) Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.<sup>38</sup>

## B. Ketertiban Umum

### 1. Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung dua arti. Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.<sup>39</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggaran/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban

<sup>38</sup> Ibid., h. 182

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 56

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum sesuai peraturan perundangan-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.<sup>40</sup> Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini akan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundangan-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri.

Dalam konsep Anglo Saxon, ketertiban umum disebut dengan public policy. Dari istilah yang dipakai ini, yang mengemuka adalah unsur politiknya yaitu policy. Jadi, sebagian besar disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor politik dalam menentukan apakah suatu kaidah bertentangan dengan public policy atau tidak. Konsep Anglo Saxon tentang public policy ini sangat tergantung kepada kebijakan eksekutif.

Contoh perkara yang terkenal *Luther v. Sagor*, suatu *cause célèbre* yang menjadi tulang punggung bagi *act of state*, doktrin Inggris berkenaan dengan pencabutan hak milik perseorangan. Dalam hal ini, pihak yudikatif merasa dirinya terikat kepada sikap dan pendirian pihak eksekutif. Apabila perbuatan dari suatu negara dalam melakukan pencabutan hak milik

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 57



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap demikian biadab adanya hingga melanggar asas hukum antar negara, maka pemerintah Inggris tidak mengakui hukum negara tersebut. Oleh karena itu, pihak yudikatif mudah untuk juga tidak mengakui tindakan-tindakan Negara tersebut sebagai suatu yang sah. Akan tetapi, bila pihak eksekutif masih mengakui pemerintah suatu negara tersebut dalam melakukan pencabutan hak milik tanpa ganti rugi, maka pihak yudikatif akan merasa terikat pula dengan sikap eksekutif ini, dan akan tetap menganggap pencabutan hak milik ini sebagai suatu yang sah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk menentukan apakah kaidah asing dianggap bertentangan dengan public policy atau tidak, dipandang oleh pihak yudikatif atau pun para hakim Inggris sebagai tugas yang harus dijalankan oleh pihak eksekutif, bukan oleh hakim. Dari sini, tampak bahwa unsur politik selalu memegang peranan penting dalam menentukan apakah suatu kaidah asing melanggar ketertiban umum atau tidak.

## 2. Fungsi Ketertiban Umum

Secara tradisional, doktrin-doktrin HPI membedakan dua fungsi lembaga Ketertiban Umum, yaitu:

- a. Fungsi Positif Yaitu menjamin agar aturan-aturan tertentu dari *lex fori* tetap diberlakukan (tidak dikesampingkan) sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI atau melalui proses pendekatan HPI, terlepas dari persoalan hukum mana yang seharusnya berlaku, atau apa pun isi kaidah/aturan *lex fori* yang bersangkutan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Fungsi Negatif Yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah-kaidah hukum asing jika pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep-konsep dasar lex fori.

### **3. Tujuan ketertiban umum**

Tujuan daripada pencantuman asas ketertiban umum di dalam Konvensi New York 1958 adalah untuk menghormati dan mempertahankan integritas kedaulatan hukum dan kedaulatan negara yang bersangkutan.<sup>41</sup>

### **4. Penerapan ketertiban umum**

Sejak berlakunya Keppres ini, Indonesia telah mengikat diri dengan suatu kewajiban hukum, untuk mengakui dan mematuhi pelaksanaan eksekusi atas setiap putusan, arbitrase asing.

Pengaturan asas ketertiban umum terhadap putusan arbitrase asing diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia. Dalam UU Arbitrase ketertiban umum dicantumkan pada Pasal 66 huruf(c) yang berbunyi: “Putusan arbitrase internasional yang dimaksud hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.” Pada UU Arbitrase, konsep ketertiban umum masih sangat luas. Tidak ada penjelasan mengenai kriteria dari pelanggaran terhadap ketertiban umum.

---

<sup>41</sup> Yahya Harahap, Arbitrase, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 19.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, penolakan berdasarkan arbitrality merupakan hal yang tidak diatur secara detil. Indonesia cenderung menggunakan ketertiban umum karena bertentangan dengan hukum nasional. Penerapan azas ketertiban umum di Indonesia dapat dilihat melalui penafsiran hakim terhadap ketertiban umum

## C. Minuman Keras

### 1. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberi perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol.

Minuman keras terdiri dari 3 golongan yaitu minuman keras golongan A (kadar etanol 1-5%), minuman keras golongan B(kadar etanol 5-20%), dan minuman keras golongan C (kadar etanol 20-50)<sup>42</sup>

Minuman keras telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan panjang peradaban manusia. Bangsa Mesir kuno percaya bahwa bouza, sejenis bir, merupakan penemuan Dewi Osiris dan merupakan makanan sekaligus minuman. Anggur juga ditemukan oleh bangsa Mesir

<sup>42</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman\\_keras](https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras) (di akses pada 19-februari-2021, pukul 19:43 WIB)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuno dan dipergunakan untuk perayaan atau upacara keagamaan dan sekaligus sebagai obat.

Di negara Indonesia juga dijumpai banyak minuman tradisional yang mengandung alkohol seperti tuak, arak dan lainnya. Setelah melalui perjalanan sejarah yang amat panjang barulah pada paruh pertengahan abad 18 para dokter di Inggris menemukan adanya efek buruk alkohol terhadap kesehatan.<sup>43</sup>

## 2. Dampak Minuman Keras

- a. GMO (Gangguan Mental Organik), yang mengakibatkan perubahan perilaku seperti bertindak kasar, sehingga bermasalah dengan keluarga, masyarakat, dan kariernya. Perubahan fisiologis, seperti mata juling, muka merah, dan jalan sempoyongan. Kemudian, perubahan psikologi, seperti susah konsentrasi, bicara melantur, mudah tersinggung dan lainnya.
- b. Merusak Daya Ingat, yaitu pada usia remaja (17-19 tahun), otak manusia masih mengalami perkembangan pesat, oleh karena itu, sayang sekali jika remaja sudah biasa dengan kecanduan minuman beralkohol, karena akan menghambat perkembangan memori dan sel-sel otak.
- c. Odema Otak, merupakan pembengkakan dan terbenyungnya darah pada jaringan-jaringan otak sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi dalam otak secara normal.

<sup>43</sup><http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/134/jtptunimus-gdl-odefandier-6682-3-babiir-3.pdf> (diakses pada 19-februari-2021 pukul 20.03 WIB)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Sirosis* Hati, penyakit ini ditandai oleh pembentukan jahngan ikat disertai nodul pada hati karena infeksi akut dan virus hepatitis yang menyebabkan peradangan sel hati yang luas dan kematian sel.
- e. Gangguan Jantung, mengonsumsi minuman beralkohol, apalagi kecanduan, bisa mengakibatkan gangguan Jantung, dimana lama kelamaan Jantung tidak akan berfungsi dengan baik.
- f. *Gastrinitis*, yaitu karena kecanduan minuman keras dimana menyebabkan radang, atau luka pada lambung.
- g. *Paranoid*, yaitu gangguan kejiwaan karena kecanduan dimana seolah-olah merasa dipukuli, sehingga perilakunya kasar terhadap orang-orang yang ada disekitarnya, atau seperti ada bisikan-bisikan untuk melakukan sesuatu, dan ia akan melakukan sesuatu diluar nalarnya.<sup>44</sup>

Untuk mengatasi dampak negatif terhadap penggunaan minuman beralkohol seperti tersebut diatas, sekiranya perlu dicegah dan di batasi penjualannya dengan didukung oleh kinerja satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan peraturan daerah yang berkaitan terhadap minuman keras tersebut.

#### D. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pemerintahan Daerah Pelaksanaan otonomi daerah memberikan hak dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

<sup>44</sup> <https://www.alodokter.com/sering-mabuk-miras-ini-akibatnya> (diakses pada 21-02-2021 pukul 19:21 WIB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

undangan, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal sekaligus menyikapi berbagai persoalan yang timbul di daerah serta penyelesaiannya secara mandiri.

Untuk melaksanakan setiap urusan pemerintahan daerah harus diiringi dengan pelaksana pemerintahan daerah yaitu aparatur pemerintahan daerah yang berfungsi untuk melaksanakan roda pemerintahan di daerah. Yang menjadi tolak ukur dalam kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintahannya adalah dengan dimilikinya aparatur pemerintahan daerah tersendiri yang terpisah dengan aparatur pemerintah pusat, hal ini bertujuan untuk memfokuskan daerah dalam mengerjakan urusan pemerintahan daerah sehingga mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara aparatur pemerintahan daerah dan aparatur pemerintahan pusat.<sup>45</sup>

Terdapat berbagai organisasi/lembaga yang berada dibawah pemerintah daerah seperti dinas-dinas dan lembaga teknis daerah serta organisasi pemerintahan lainnya salah satunya ialah satuan polisi pamong praja untuk menyelenggarakan peraturan daerah agar terlaksana dengan baik.<sup>46</sup>

Sebagai upaya untuk menanggulangi berbagai persoalan yang timbul dimasyarakat, maka stabilitas nasional serta ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu hal yang menjadi focus point pemerintah daerah, sehingga keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja berserta

<sup>45</sup> *Op. Cit* Josef Riwu, h. 39

<sup>46</sup> Widjaja HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, ( Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 28

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tugas yang melekat padanya untuk membantu kepala daerah dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diharapkan dapat menjadi problem solving dari permasalahan pemerintahan daerah yang tengah berlangsung.

## E. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

### 1. Pengertian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.<sup>47</sup>

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Tugas satuan polisi pamong praja terdapat didalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 pada bab III Pasal 5, yang berbunyi :

“Menegakkan Peraturan daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA), Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dan, Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

<sup>47</sup> Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana yang tertulis didalam Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tersebut, sangat erat kaitannya dengan permasalahan mengenai penertiban minuman beralkohol yang ada di kabupaten Indragiri Hulu.

## 2. Pengertian Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.<sup>48</sup> dan menurut KBBI fungsi merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling 16 berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Maka fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja sendiri tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 bab III Pasal 6 yang berbunyi :

“Fungsi yang pertama penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, yang kedua penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, yang ketiga berfungsi sebagai pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

---

<sup>48</sup> Ibid. h. 39



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait, selanjutnya pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada, dan yang terakhir pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>49,,</sup>

## F. Pengertian Ketertiban dan Ketentraman Umum

Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, Kesejahteraan, dan Keamanan”.<sup>50</sup>

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut pemerintah. Walaupun peraturan-peraturan tersebut telah dikeluarkan namun masih ada yang melanggar peraturan-peraturan tersebut dan sudah tentu dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum itu. Dalam implementasinya ketertiban umum merupakan salah satu fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja .

Ketentraman yang berasal dari kata tentram adalah, aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya di daerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran) misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya.

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2018

<sup>50</sup> Wikipedia Indonesia (diakses pada 19 Februar 2021 pukul 20.09)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain :

“Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan”<sup>51</sup>

Selanjutnya Menurut Ermaya :

“Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan.”<sup>52</sup>

Defenisi diatas, menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan. Dari rangkaian analisis berbagai teori mengenai ketertiban dan ketentraman yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan / kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

<sup>51</sup> Badudu dan zain, *Kamus Bahasa Indonesia*.( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 2001)

h.21

<sup>52</sup> Ermaya suradinata, *pemimpin dan kepemimpinan pemerintah (jakarta: Gramedia pustaka utama 2007)* h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penanggulangan peredaran minuman keras oleh Satuan Polisi Pamong Praja Indragiri Hulu dilakukan berbagai upaya seperti : satuan polisi pamong Indragiri Hulu memiliki beberapa tahapan dalam menangani pelanggar peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, seperti memberi peringatan, menaikkan kasus ketingkat selanjutnya hingga para pelanggar dapat merasa jera dengan pelanggaran yang dilakukannya.
2. Penghambat satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penanggungan peredaran minuman keras baik internal maupun eksternal. Penghambat internal seperti, polisi pamong praja kabupaten Indragiri hulu memiliki beberapa kendala internal seperti kurangnya personil, praja muda, serta oprasional satuan polisi pamong praja kabupaten Indragiri hulu dalam menanggulangi penyebaran minuman keras. Adapun penghambat eksternal seperti masyarakat yang tidak tahu dan tidak sadar akan hukum, kemudian factor ekonomi sangat mempengaruhi para pedagang menjual minuman keras untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga laporan dari RT RW bahkan warga yang tidak jelas kevalidannya.

## B. Saran

1. Sebelum melaksanakan operasi atau penindakan terhadap pelanggar, hendaknya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi terhadap Perda dan Perkada yang dapat mengakibatkan hilangnya ketertiban umum di dalam masyarakat dan dampak dari pelanggaran yang di lakukan.
2. Tokoh masyarakat dan masyarakat seharusnya lebih memahami hukum yang berlaku Agar terciptanya ketertiban umum di dalam lingkungan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hakim, suparlan. *Pendidikan Kewarganegaraan* untuk Perguruan Tinggi. Malang : Um Press 2002.
- Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : kencana, 2011.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Badudu, J.S & zain Sultan Mohammad. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Ermaya Suradinata, *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Dekker, Nyoman. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Malang: IKIP Malang
- Friedman, M. Laurence, *American Law: introduction*, Edisi II, Alih Bahasa oleh Wisnu, Jakarta: Tata Nusa, 2001
- F. Lamintang dan Theo. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (speciale delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1991.
- R. Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2010

Jurnal Ilmu Hukum Linda Ayu Pralamita “*upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol di kabupaten kudas*” (E-Journal Maret 2018)

Ilham dwi maryadi “*penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di kabupaten bantul*”(E-journal Juni 2016)

<https://halosehat.com/farmasi/aditif/25-efek-bahaya-alkohol-bagi-kesehatan-dan-kehidupan-sosial>,

<https://riaupos.jawapos.com/kriminal/25/04/2018/181166/58-kategoriberita-indragiri-hulu.html>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomer 11 Tahun 2014 Tentang Pelarangan dan Penindakan Penyakit Masyarakat

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“UPAYA SATPOL PP DALAM PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PELARANGAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT”**, yang ditulis oleh:

Nama : **RIKY DWI JUANDA**  
 NIM : 11527103243  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juli 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Erman, M.Ag**

Sekretaris  
**Joni Alizon, SH., MH**

Penguji I  
**Dr. Aslati, M.Ag**

Penguji II  
**Asril, SH., MH**

Mengetahui :  
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
 NIP. 19750801 200701 1 023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6965/2020  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 04 Desember 2020

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RIKY DWI JUANDA  
NIM : 11527103243  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : XI (Sebelas)  
Lokasi : terminal gerbang sari, kantor satuan polisi pamong praja indragiri

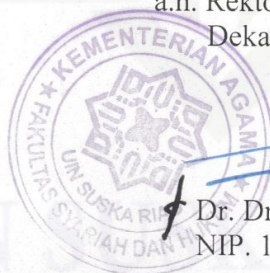
hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:penertiban minuman beralkohol yang di lakukan satuan polisi pamong praja di kecamatan  
rengat barat kabupaten indragiri hulu berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2014  
tentanv pelarangan dan penindakan penyakit masyarakat

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

## REKOMENDASI

• Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37628  
 TENTANG

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6965/2021 Tanggal 4 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

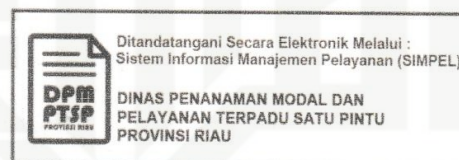
- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>RIKY DWI JUANDA</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | <b>11527103243</b>  |
| 3. Program Studi     | : | <b>ILMU HUKUM</b>   |
| 4. Jenjang           | : | <b>S1</b>   |
| 5. Alamat            | : | <b>PEKANBARU</b>  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL YANG DILAKUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDAGIRIHULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PELARANGAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <b>TERMINAL GERBANG SARI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PERAJA INDRAGIRI HULU</b>  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 13 Januari 2021



#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth :  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Indragiri Hulu

di Tempat

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: RIKY DWI JUANDA.

Tempat/Tgl Lahir

: KERINCI 04-JUNI-1996

NIM

: 11527103243

Fakultas

: SYARIAH DAN HUKUM.

Alamat Penelitian

: JL. LINTAS SUMATRA, RENGAT BARAT, INHU

Judul Penelitian

: PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL YANG DILAKUKAN SAT POL PP  
KEC. RENGAT BARAT KAB. INHU BERDASARKAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG PELARANGAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT.


Hp

: 085263090868.

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mempergunakan hasil penelitian untuk keperluan lainnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya ajukan, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Rengat, 19 JANUARI 2020.

  
RIKY DWI JUANDA.

UIN SUSKA RIAU





RENGAS 19 JANUARI 2021...

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Indragiri Hulu

Perihal : Permohonan Untuk Mendapatkan  
Surat Keterangan Penelitian

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

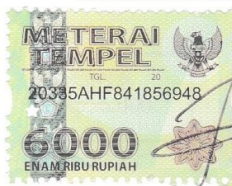
Nama : RIKY DWI JUANDA  
Tempat/Tgl. Lahir : KERINCI 04 - JUNI - 1996  
No. Telepon : 0852 63 07 0868  
Tanggal dan Nomor KTP : 12-04-2016 / 1402010406960003  
Pekerjaan : MAHASISWA  
Alamat : JL. ALI HATI

Dengan ini mengajukan permohonan ke hadapan Bapak untuk mendapatkan Surat Keterangan penelitian..

Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Permohonan Surat Keterangan penelitian dari lembaga Penanggung jawab yang diajukan kepada DPMPTSP Kab. Inhu
2. Rekomendasi Penelitian dari DPMPTSP Provinsi Riau
3. Foto copy Proposal Penelitian
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar.
5. Bagi lembaga melampirkan Foto Copy akte pendirian, surat keterangan terdaftar (SKT) dari Kesbang Kab. Inhu
6. Foto Copy NPWP (bagi lembaga)
7. Foto Copy KTM (bagi Mahasiswa/i)

Demikian permohonan ini saya ajukan kepada Bapak, kiranya Bapak berkenan mengabulkannya.



Pemohon,

RIKY DWI JUANDA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## FORM DATA SURAT KETERANGAN PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Nama

RIKY DWI JUANDA.

2. NIM

11527103243.

3. Jenjang

STRATA I (SI).

4. Alamat

Jl. ALI HAJI

5. Untuk

: Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Disertasi/Tesis/Skripsi/Tugas Akhir) dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul Penelitian

: PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL YANG DIKUKUH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN RENGAT BARAT KAB. INDRASIRI KULU BERDASARKAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PEMERANGKAT DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT

b. Tujuan Penelitian

: UNTUK MEMENUHI PENELITIAN PADA SKRIPSI ATAU TUGAS AKHIR.

c. Lokasi Penelitian

: TERMINAL GERBANG SARI. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

d. Waktu Penelitian

: 2 BULAN.

e. Bidang Penelitian

: PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN (ILMU HUKUM).

f. Status Penelitian

: Mahasiswa / Lembaga / Organisasi

g. Penanggung Jawab / Fakultas

: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM.

i. Universitas / Lembaga

: UNIVERSITAS ISLAM NEGRISULTAN SYARIF KASIM.

Pemohon,

RIKY DWI JUANDA.

UIN SUSKA RIAU